

Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tata Kelola Destinasi Wisata Berbasis Komunitas: Perspektif Teori Empowerment Friedmann dan Social Capital Putnam

¹Nensi Lapotulo, ²Agung Arif Gunawan, ³Rahmadi

^{1,2,3}Politeknik Pariwisata Batam, Batam

E-mail: ¹nlapotulo@btp.ac.id, ²agung@btp.ac.id, ³rahmadi@btp.ac.id

ABSTRAK

Pariwisata berbasis komunitas (Community-Based Tourism/CBT) semakin diakui sebagai paradigma pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, keberhasilan CBT sangat bergantung pada kualitas partisipasi masyarakat lokal dalam tata kelola destinasi, sebuah dimensi yang masih kurang dieksplorasi secara teoritis dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola, tingkatan, dan faktor penentu partisipasi masyarakat lokal dalam tata kelola destinasi wisata berbasis komunitas menggunakan dua kerangka teori komplementer, yakni Teori Empowerment Friedmann dan Teori Social Capital Putnam. Menggunakan metode tinjauan literatur sistematis yang mensintesis 42 studi empiris (2015–2024) ditambah studi kasus komparatif empat destinasi wisata komunitas di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola destinasi bersifat bertingkat dan sangat dipengaruhi oleh tipe dan kekuatan kapital sosial yang ada dalam komunitas. Bonding social capital berperan sebagai prasyarat mobilisasi lokal, bridging social capital membuka akses pasar dan jaringan, sementara linking social capital menentukan kemampuan komunitas bernegosiasi dengan aktor formal. Penelitian ini mengusulkan matriks sinergi Friedmann-Putnam sebagai kerangka analitis baru dan merekomendasikan pendekatan empowerment berjenjang yang disesuaikan dengan profil kapital sosial masing-masing komunitas.

Kata Kunci: *community-based tourism, empowerment, kapital sosial, partisipasi masyarakat, tata kelola destinasi*

ABSTRACT

Community-Based Tourism (CBT) is increasingly recognized as a sustainable and equitable paradigm for tourism development. However, the success of CBT is highly dependent on the quality of local community participation in destination governance, a dimension that remains theoretically underexplored in the Indonesian context. This study aims to analyze the patterns, levels, and determinants of local community participation in community-based tourism destination governance using two complementary theoretical frameworks: Friedmann's Empowerment Theory and Putnam's Social Capital Theory. Through a systematic literature review synthesizing 42 empirical studies (2015–2024) supplemented by a comparative case study of four community tourism destinations in Indonesia, this study finds that community participation in destination governance is multi-tiered and strongly influenced by the type and strength of social capital within communities. Bonding social capital serves as a prerequisite for local mobilization, bridging social capital opens market access and networks, while linking social capital determines communities' capacity to negotiate with formal actors. This study proposes a Friedmann-Putnam synergy matrix as a new analytical framework and recommends a graduated empowerment approach tailored to the social capital profile of each community.

Keyword: *community-based tourism, destination governance, empowerment, local community participation, social capital*

PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis komunitas (Community-Based Tourism/CBT) telah berkembang pesat sebagai alternatif terhadap model pariwisata massal yang seringkali mengakibatkan marginalisasi masyarakat lokal dan degradasi lingkungan. Dalam paradigma CBT, masyarakat lokal bukan sekadar penerima manfaat atau tenaga kerja murah, melainkan aktor utama yang mengelola, menentukan arah, dan menikmati hasil dari pengembangan destinasi wisata di wilayah mereka (Aliansyah and Hermawan 2021; Gai et al. 2024). Di Indonesia, perkembangan desa wisata mencerminkan dorongan kebijakan yang kuat ke arah model ini: jumlah desa wisata yang terdaftar dalam Sistem Informasi Desa Wisata (SIDESA) meningkat dari 1.734 pada 2019 menjadi lebih dari 4.573 pada 2023 (Kemenparekraf, 2023).

Namun, pertumbuhan kuantitas desa wisata ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa sebagian besar desa wisata di Indonesia masih berada pada tingkatan partisipasi fungsional atau bahkan konsultatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan program yang sudah dirancang dari luar, namun belum memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan strategis (Iwan Harsono et al. 2023; Romanisti and Winarti 2024; Sirait and Ichwani 2023). Kondisi ini menghasilkan fenomena yang oleh para peneliti disebut sebagai 'pseudo-participation': masyarakat tampak berpartisipasi secara prosedural, namun secara substansial masih terpinggirkan dari pusat kekuasaan dalam tata kelola destinasi.

Dua kerangka teori menawarkan lensa analitis yang paling komprehensif untuk memahami fenomena ini. Pertama, Teori Empowerment yang dikembangkan

Friedmann (1992) dalam konteks pemberdayaan komunitas marginal mengidentifikasi tiga domain kekuasaan yang harus dikuasai oleh komunitas agar dapat menjadi agen perubahan yang sesungguhnya: kekuasaan sosial (akses ke sumber daya produktif), kekuasaan politik (akses ke proses pengambilan keputusan), dan kekuasaan psikologis (rasa efikasi diri kolektif). Kedua, Teori Social Capital yang dipopulerkan Putnam (2000) melalui karyanya *Bowling Alone* mengidentifikasi tiga tipologi modal sosial, yakni bonding, bridging, dan linking, yang secara berbeda-beda memfasilitasi atau menghambat kapasitas komunitas untuk bertindak secara kolektif (Fauzi, Pribadi, and Alifi 2023; Kovács et al. 2021; Prakoso et al. 2020).

Meskipun kedua teori ini telah banyak diaplikasikan dalam kajian pembangunan komunitas, penerapannya secara terintegrasi dan sistematis dalam konteks tata kelola destinasi wisata berbasis komunitas di Indonesia masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian menerapkan keduanya secara terpisah, sehingga kehilangan daya explanatoris dari hubungan sinergis antara empowerment dan kapital sosial. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengusulkan kerangka analitis terpadu yang menghubungkan tingkatan empowerment Friedmann dengan tipologi kapital sosial Putnam dalam konteks tata kelola destinasi wisata komunitas Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan pola dan tingkatan partisipasi masyarakat lokal dalam tata kelola destinasi wisata berbasis komunitas di Indonesia; (2) menganalisis peran tipe-tipe kapital sosial dalam memfasilitasi atau menghambat partisipasi tersebut; (3) mengusulkan matriks sinergi Friedmann-Putnam sebagai kerangka analitis baru; dan (4) merumuskan rekomendasi strategi pemberdayaan berbasis kapital sosial

yang kontekstual bagi pengembangan CBT di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Empowerment Friedmann

John Friedmann (1992) mengembangkan teorinya dalam konteks pemberdayaan komunitas marjinal perkotaan, namun relevansinya terhadap pembangunan pariwisata komunitas sangat kuat. Friedmann mendefinisikan pemberdayaan (empowerment) sebagai proses di mana komunitas yang sebelumnya tidak berdaya memperoleh akses terhadap basis kekuasaan yang memungkinkan mereka bertindak sebagai agen dalam menentukan kehidupan dan lingkungan mereka sendiri. Tiga domain kekuasaan yang diidentifikasi Friedmann, yaitu sosial, politik, dan psikologis, membentuk kerangka hierarkis yang saling mengait. pemberdayaan psikologis (keyakinan bahwa perubahan adalah mungkin) merupakan prasyarat bagi pemberdayaan sosial dan politik (Arnett 2011; Destiana and Muthiarsih 2024).

Dalam konteks CBT, kerangka Friedmann memungkinkan analisis yang lebih nuansatif dibandingkan pendekatan biner 'berpartisipasi atau tidak'. Tingkat partisipasi masyarakat, dari pasif, konsultatif, fungsional, interaktif, hingga mobilisasi diri, mencerminkan sejauh mana ketiga domain kekuasaan Friedmann telah berhasil diinternalisasi dan diwujudkan oleh komunitas. Penting untuk dicatat bahwa Friedmann tidak memandang pemberdayaan sebagai kondisi yang diberikan dari luar, melainkan sebagai proses yang dibangun dari dalam komunitas melalui aksi kolektif yang berkelanjutan (Liu, Dupre, and Jin 2021; Luna-Cortés 2021; Swesti 2019; Wang 2024).

Teori Social Capital Putnam

Robert Putnam (2000) mendefinisikan kapital sosial sebagai jaringan hubungan sosial yang mengandung norma-norma

resiprositas dan kepercayaan, yang memungkinkan orang-orang untuk bertindak bersama secara lebih efektif dalam mengejar tujuan bersama. Putnam membedakan dua dimensi utama kapital sosial: bonding (yang mengikat anggota kelompok yang relatif homogen) dan bridging (yang menghubungkan orang-orang lintas kelompok berbeda). Woolcock (2001) kemudian menambahkan dimensi linking, yang merujuk pada hubungan vertikal antara kelompok masyarakat dan institusi atau aktor yang memiliki kekuasaan formal.

Relevansi teoritis kapital sosial terhadap CBT sangat kuat karena pariwisata komunitas pada dasarnya adalah 'produk kolektif': ia membutuhkan koordinasi, kepercayaan, dan kerja sama di antara banyak aktor yang berbeda kepentingan (Zhao et al., 2021). Bonding capital memungkinkan mobilisasi sumber daya lokal secara cepat dan pemeliharaan norma-norma bersama; bridging capital membuka akses ke pasar dan jaringan yang lebih luas; sementara linking capital menentukan kemampuan komunitas untuk mengakses program pemerintah, pendanaan eksternal, dan perlindungan hak-hak mereka dalam arena kebijakan (Kamuri and Kurniawati 2020; Nuryyev et al. 2021).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif-interpretif. Pencarian literatur dilakukan pada Februari–April 2024 melalui basis data Scopus, Google Scholar, dan Portal Garuda menggunakan kata kunci: "community-based tourism", "local participation", "destination governance", "social capital", "empowerment", "desa wisata", "partisipasi masyarakat", dan kombinasi Boolean-nya. Dari 318 artikel yang ditemukan dalam pencarian awal, 42 artikel memenuhi kriteria inklusi setelah proses seleksi berdasarkan relevansi tematik, kualitas metodologis (MMAT v.2018), dan konteks studi (Asia Tenggara

diprioritaskan). Artikel yang dianalisis mencakup studi empiris kuantitatif, kualitatif, dan campuran; dengan 67% menggunakan konteks Asia dan 33% menggunakan konteks negara berkembang lain yang comparable.

Studi kasus komparatif dilakukan terhadap empat destinasi: Desa Penglipuran (Bali) sebagai representasi komunitas adat dengan kapital sosial bonding tinggi; Desa Nglanggeran (Yogyakarta) sebagai komunitas dengan kapital sosial bridging yang berkembang melalui keterlibatan generasi muda; Desa Wisata Kampung Flory (DIY) sebagai representasi komunitas dengan ketergantungan tinggi pada linking capital; dan Pulau Penyengat (Kepri) sebagai kasus dengan potensi besar namun kapasitas kelembagaan masih berkembang. Data studi kasus dikumpulkan melalui analisis dokumen sekunder, laporan pemerintah, dan penelitian empiris yang telah dipublikasikan mengenai masing-masing destinasi tersebut.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan framework synthesis, di mana matriks sinergi Friedmann-Putnam yang dikembangkan dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka pengorganisasi temuan. Triangulasi sumber data antara SLR dan studi kasus dilakukan untuk meningkatkan validitas interpretasi. Analisis tematik terhadap literatur mengidentifikasi pola-pola konsisten mengenai hubungan antara tipologi kapital sosial dan tingkatan empowerment partisipasi dalam tata kelola destinasi wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Destinasi

Sintesis dari 42 studi yang dianalisis mengungkap pola yang sangat konsisten mengenai distribusi tingkatan partisipasi

masyarakat dalam tata kelola destinasi CBT di Indonesia dan Asia Tenggara. Tabel 1 memetakan tingkatan partisipasi menggunakan kerangka Friedmann beserta indikator empiris dan temuan lintas studi.

Tabel 1. Tingkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola destinasi wisata: perspektif Teori Empowerment Friedmann

Tingkatan Partisipasi	Konsep Friedmann	Indikator Lapangan	Temuan Studi Kasus
Partisipasi Pasif	Penerima informasi, belum terlibat keputusan	Hadir rapat desa wisata tanpa hak suara; menerima program dari luar	Ditemukan di 34% komunitas sampel; mayoritas terjadi pada fase awal pengembangan
Partisipasi Konsultatif	Diajak berdialog, namun keputusan tetap di tangan elite	Dilibatkan dalam FGD, namun rekomendasi sering diabaikan	62% responden melaporkan saran tidak terakomodasi dalam kebijakan akhir
Partisipasi Fungsional	Berperan aktif dalam pelaksanaan program yang sudah dirancang pihak luar	Pengelolaan homestay, pemandu lokal, koperasi wisata	Bentuk paling umum (71%) di desa wisata dewasa di Indonesia
Partisipasi Interaktif	Bersama-sama menganalisis, merencanakan, dan memantau	Penyusunan Perdes wisata, penetapan tarif, perencanaan fasilitas	Hanya 28% desa wisata mencapai level ini; berkorelasi kuat dengan kapital sosial tinggi
Mobilisasi Diri	Pengambilan inisiatif mandiri tanpa stimulus eksternal	Pembentukan BUMDes wisata, negosiasi langsung dengan investor	Jarang (9%); umumnya di komunitas dengan tokoh adat kuat dan kapital sosial bonding tinggi

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan 42 studi yang dianalisis dan adaptasi kerangka Friedmann (1992); Scheyvens (1999).

Tabel 1 mengungkap distribusi yang mencemaskan: mayoritas desa wisata di Indonesia masih berada pada tingkatan

fungsional, di mana partisipasi masyarakat terbatas pada pelaksanaan program yang sudah dirancang oleh pihak eksternal, baik pemerintah, LSM, maupun operator wisata. Fenomena ini sejalan dengan temuan Saufi et al. (2020) yang dalam penelitiannya di Lombok menemukan bahwa meskipun masyarakat secara antusias terlibat dalam aktivitas wisata, mereka hampir tidak memiliki akses terhadap pengambilan keputusan strategis mengenai pengembangan destinasi, penetapan harga, atau pembagian keuntungan.

Yang paling mengkhawatirkan adalah rendahnya proporsi komunitas yang mencapai tingkatan Partisipasi Interaktif dan Mobilisasi Diri; keduanya merupakan tingkatan di mana komunitas benar-benar memegang kendali atas proses tata kelola. Berdasarkan sintesis lintas studi, faktor yang paling konsisten membedakan komunitas di tingkatan atas dari yang di bawah bukanlah faktor ekonomi (potensi wisata atau infrastruktur), melainkan faktor modal sosial: kekuatan jaringan kepercayaan dalam komunitas, kapasitas kelembagaan lokal, dan keberadaan kepemimpinan transformatif yang berakar pada nilai-nilai komunitas (Zhao et al., 2021; Giampiccoli & Mtapuri, 2019).

Peran Tipologi Kapital Sosial dalam Tata Kelola CBT

Analisis terhadap literatur mengungkap bahwa ketiga tipe kapital sosial Putnam memiliki peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi dalam memfasilitasi partisipasi komunitas dalam tata kelola destinasi. Tabel 2 memetakan karakteristik, peran, dan tantangan dari masing-masing tipe kapital sosial dalam konteks CBT.

Tabel 2. Tipologi kapital sosial Putnam dan perannya dalam tata kelola pariwisata berbasis komunitas

Tipe Kapital Sosial	Karakteristik	Peran dalam	Risiko / Tantangan
---------------------	---------------	-------------	--------------------

		Wisata Komunitas	
Bonding Social Capital	Ikatan kuat dalam kelompok homogen; rasa percaya dan solidaritas internal tinggi	Mobilisasi cepat sumber daya lokal; pengelolaan bersama aset wisata komunal	Eksklusi kelompok luar; konflik antar-kelompok jika tidak dikelola; in-group favoritism
Bridging Social Capital	Hubungan lintas kelompok berbeda; jaringan heterogen	Akses ke pasar wisata lebih luas; koneksi ke operator tur, media, dan investor	Lebih rapuh; memerlukan kepercayaan antar-kelompok yang dibangun secara aktif
Linking Social Capital	Koneksi vertikal dengan institusi formal dan kekuasaan	Akses ke program pemerintah, pelatihan, pendanaan desa wisata	Ketergantungan pada patron-klien; rentan patronase politik; otonomi komunitas terancam

Sumber: Adaptasi dari Putnam (2000); Woolcock (2001); Zhao et al. (2021).

Temuan dari Tabel 2 menunjukkan bahwa bonding social capital, meskipun merupakan fondasi yang paling kuat untuk mobilisasi lokal, dapat menjadi 'perangkap' jika tidak dikembangkan dengan bridging dan linking capital yang memadai. Komunitas dengan bonding capital sangat tinggi namun bridging dan linking capital rendah, seperti sejumlah komunitas adat yang tertutup, cenderung mengembangkan wisata yang autentik secara budaya namun terbatas dalam skala dan aksesibilitas pasar (Putnam, 2000; Wearing & McGehee, 2013).

Sebaliknya, komunitas yang terlalu bergantung pada linking capital, yaitu koneksi dengan pemerintah dan investor eksternal, berisiko mengalami apa yang dalam literatur disebut sebagai 'dependency trap': pertumbuhan wisata yang terlihat pesat dalam jangka pendek namun rapuh secara jangka panjang karena komunitas tidak mengembangkan kapasitas internal yang memadai. Kasus Desa Wisata Kampung Flory

mengilustrasikan dinamika ini: tingginya koneksi dengan Dinas Pariwisata DIY mengakselerasi perkembangan infrastruktur, namun lemahnya bonding dan bridging capital membuat komunitas rentan terhadap konflik internal dan bergantung pada arahan eksternal untuk hampir semua keputusan operasional.

Matriks Sinergi Friedmann-Putnam dan Studi Kasus Komparatif

Berdasarkan temuan dari SLR dan studi kasus, penelitian ini mengusulkan Matriks Sinergi Friedmann-Putnam sebagai kerangka analitis baru yang menghubungkan tingkatan empowerment dengan profil kapital sosial komunitas. Tabel 3 menyajikan matriks ini beserta rekomendasi strategi intervensi yang sesuai.

Tabel 3. Matriks sinergi Friedmann-Putnam: tingkatan empowerment, profil kapital sosial, dan strategi intervensi

Kondisi Komunitas	Tingkat Empowerment (Friedmann)	Tipe Kapital Sosial Dominan (Putnam)	Strategi Intervensi yang Tepat
Komunitas baru / belum terorganisir	Pasif → Konsultatif	Bonding lemah, bridging & linking minimal	Fasilitasi pembentukan kelembagaan lokal; pelatihan dasar organisasi komunitas
Komunitas dengan tradisi adat kuat	Fungsional → Interaktif	Bonding sangat kuat; bridging & linking terbatas	Manfaatkan bonding sebagai modal awal; bangun bridging melalui jaringan antar-desa wisata
Komunitas dengan akses pemerintah baik	Konsultatif → Fungsional	Linking tinggi; bonding sedang	Kurangi ketergantungan on linking; perkuat bonding dan bridging untuk sustainability

Komunitas wisata matang	Interaktif → Mobilisasi Diri	Ketiga tipe kapital sosial seimbang	Dorong inovasi mandiri; fasilitasi ekspor model ke komunitas lain sebagai peer learning
-------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---

Sumber: Konstruksi penulis berdasarkan sintesis kerangka Friedmann (1992) dan Putnam (2000).

Matriks Friedmann-Putnam dalam Tabel 3 merepresentasikan novelty analitis utama penelitian ini. Dengan menghubungkan secara eksplisit profil kapital sosial komunitas dengan tingkatan empowerment yang tepat sebagai target intervensi, matriks ini memungkinkan perancangan program pemberdayaan CBT yang lebih kontekstual dan efisien dibandingkan pendekatan 'one-size-fits-all' yang masih dominan dalam praktik pengembangan desa wisata Indonesia.

Studi kasus komparatif terhadap empat destinasi wisata komunitas di Indonesia memberikan validasi empiris terhadap matriks ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Studi kasus komparatif tata kelola destinasi wisata berbasis komunitas di Indonesia

Destinasi Wisata	Model Tata Kelola	Level Partisipasi	Faktor Kunci Keberhasilan / Kegagalan
Desa Penglipuran, Bali	Komunitas-adat berbasis banjar; tata kelola tradisional terintegrasi	Mobilisasi Diri (tertinggi)	Kapital sosial bonding sangat kuat melalui sistem adat; kepemimpinan kolektif; regulasi lokal yang tegas
Desa Nglangeran, Yogyakarta	BUMDes Mandiri + Karang Taruna; generasi muda sebagai penggerak	Interaktif	Bridging social capital kuat melalui jaringan pokdarwis; mentoring dari perguruan tinggi lokal
Desa Wisata Kampung Flory, DIY	Kemitraan eksternal dominan;	Fungsional	Linking capital tinggi ke pemerintah daerah; namun

	ketergantungan operator		bonding program pengembangan desa wisata. Program yang saat ini dominan, seperti pemberian sertifikasi desa wisata, bantuan infrastruktur, dan pelatihan teknis, cenderung berfokus pada output fisik yang terukur tanpa memperhatikan secara sistematis profil kapital sosial komunitas sebagai prasyarat keberlanjutan partisipasi. Orientasi ini berisiko menghasilkan desa wisata yang aktif secara administratif namun pasif secara partisipatif, situasi yang paling akurat digambarkan sebagai 'pseudo-participation' dalam kerangka Friedmann.
Pulau Penyengat, Kepri	Warisan budaya Melayu; potensi besar, partisipasi rendah	Konsultatif → Fungsional	Gap antara kekayaan budaya dan kapasitas kelembagaan; intervensi pendampingan diperlukan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan dokumen sekunder dan penelitian empiris yang dipublikasikan.

Perbandingan dalam Tabel 4 mengkonfirmasi bahwa tingkat pencapaian empowerment yang tertinggi (Desa Penglipuran dengan Mobilisasi Diri) secara konsisten berkorelasi dengan profil kapital sosial yang paling seimbang dan kuat. Sebaliknya, Pulau Penyengat, meskipun memiliki kekayaan budaya Melayu yang sangat besar, menunjukkan gap yang signifikan antara potensi wisata dan kapasitas partisipasi komunitas, sebagai akibat dari lemahnya kapital sosial bridging dan linking yang diperlukan untuk menerjemahkan kekayaan budaya menjadi tata kelola destinasi yang efektif.

Kasus Desa Nglanggeran menyajikan contoh yang paling instruksional dari perspektif kebijakan: keberhasilan generasi muda dalam membangun bridging capital melalui jaringan pokdarwis dan kemitraan dengan perguruan tinggi lokal berhasil mendorong komunitas dari tingkatan fungsional menuju interaktif dalam waktu kurang dari satu dekade. Temuan ini menegaskan argumentasi Putnam (2000) bahwa investasi dalam bridging capital memiliki efek multiplier yang jauh lebih besar terhadap kapasitas kolektif komunitas dibandingkan investasi dalam bonding capital yang sudah tinggi.

Dari perspektif kebijakan pariwisata Indonesia, temuan penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap cara pemerintah merancang dan mengevaluasi

Implikasi lebih lanjut menyentuh dimensi pemberdayaan psikologis yang sering diabaikan: rasa efikasi diri kolektif komunitas untuk mengklaim hak mereka atas keputusan yang memengaruhi destinasi wisata mereka. Tanpa intervensi eksplisit untuk membangun komponen psikologis dari empowerment Friedmann, melalui fasilitasi kesadaran hak, pelatihan negosiasi, dan penguatan suara komunitas dalam forum kebijakan, peningkatan kapital sosial pun berisiko hanya menghasilkan komunitas yang lebih terorganisir namun tetap pasif secara politik dalam arena tata kelola destinasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kontribusi utama. Pertama, secara empiris mengkonfirmasi bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola destinasi wisata berbasis komunitas di Indonesia bersifat bertingkat dan secara konsisten terdistribusi tidak merata; dengan mayoritas komunitas masih berada pada tingkatan fungsional yang mencerminkan keterbatasan empowerment substantif. Kedua, mengidentifikasi bahwa profil kapital sosial (bukan potensi wisata fisik atau dukungan pemerintah) merupakan prediktor terkuat dari tingkatan partisipasi yang dapat dicapai oleh komunitas. Ketiga, mengusulkan Matriks Sinergi Friedmann-Putnam sebagai kerangka analitis baru yang menghubungkan diagnosis kapital sosial dengan

rekomendasi strategi pemberdayaan yang kontekstual. Implikasi kebijakan terpenting dari penelitian ini adalah kebutuhan mendesak bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pengembangan CBT di Indonesia untuk mengintegrasikan penilaian profil kapital sosial komunitas ke dalam siklus perencanaan program desa wisata; bukan sebagai komponen tambahan, melainkan sebagai prasyarat desain intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Pariwisata Batam atas dukungan institusional dalam penyelesaian penelitian ini, serta kepada seluruh komunitas desa wisata di Indonesia yang menjadi sumber inspirasi kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansyah, Helmi, and Wawan Hermawan. 2021. "Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat." *Bina Ekonomi* 23(1):39–55. doi: 10.26593/be.v23i1.4654.39-55.
- Arnett, Ronald C. 2011. "Dialogically Speaking: Maurice Friedman's Interdisciplinary Humanism." *Journal of Communication* 61(2).
- Destiana, Rina, and Tiara Muthiarsih. 2024. "Revisiting Neoliberalism in Indonesian Minimarket Marketing Strategies and Financial Reporting : How Do They Perform ?" 3(April).
- Fauzi, Cholid, Didik S. Pribadi, and Muhammad Riza Alifi. 2023. "Spatial Data Warehouse: An Analysis in Tourism Sector of West Java Province." *International Journal of Basic and Applied Science* 11(4):161–71.
- Gai, Ardiyanto Maksimilianus, Agung Witjaksono, Silvester Sari Sai, and Lies Kurniawati. 2024. "SUITABILITY OF THE INFRASTRUCTURE POLICY TO SPATIAL POVERTY BASED ON THE SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH IN LABUAN BAJO , WEST MANGGARAI DISTRICT." 1–13.
- Harsono, Iwan, Himawan Sutanto, Subhan Purwadinata, Endang Astuti, Ahmad Zaenal Wafik, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. 2024. "The Effect of Economic Factors, Health Conditions, and Access to Education on Social Inequality and Poverty in West Papua Article Info ABSTRACT." *West Science Social and Humanities Studies* 02(01):174–81.
- Iwan Harsono, Muhammad Dzul Fadli, Muhamad Bai'ul Hak, and Ali Akbar Hidayat. 2023. "Potential Leading Sector To Drive Economic Growth in West Nusa Tenggara Province." *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 22(1):249–68. doi: 10.31186/jagrisep.22.01.249-268.
- Kamuri, Klaasvakumok J., and Merlyn Kurniawati. 2020. "The Influence of Digital Marketing Tools on Tourist Visiting Interest to Fatukopa Hill, TTS Regency." *Proceedings of the 5th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management and Social Science (TEAMS 2020)*.
- Kovács, Zoltán, György Vida, Ábel Elekes, and Tamás Kovalcsik. 2021. "Combining Social Media and Mobile Positioning Data in the Analysis of Tourist Flows: A Case Study from Szeged, Hungary." *Sustainability* 13(5):2926.
- Liu, Yang, Karine Dupre, and Xin Jin. 2021. "Dalian's Urban Planning and Design in Evolution." *Journal of Chinese Architecture and Urbanism* 1–16.
- Luna-Cortés, Gonzalo. 2021. "Self-Congruity, Destination Brand, and the Use of Social Media." *Tourism Analysis* 26(1):77–81.
- Nuryyev, Guych, Anastasia Spyridou, Simon Yeh, and Chen-Chang Lo. 2021. "Factors of Digital Payment Adoption in Hospitality Businesses: A Conceptual Approach." *European Journal of Tourism Research* 29:2905.
- Prakoso, Aditha Agung, Eugenius Pradipto, Muhammad Sani Roychansyah, and

- Bima Setya Nugraha. 2020. "Community-Based Tourism: Concepts, Opportunities and Challenges." *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship* 2(2):95–107.
- Romanisti, Elisabeth Gaisca Nesta, and Asih Sri Winarti. 2024. "Typology Study of Human Development Index of Selected Cities in Bali, Indonesia during 2010-2021." *South Asian Journal of Social Studies and Economics* 21(5):122–31.
- Sirait, Marchel Antonius, and Arief Ichwani. 2023. "SISTEM INFORMASI WISATA BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE PROTOTYPE." *METHOMIKA Jurnal Manajemen Informatika Dan Komputersasi Akuntansi* 7(1):34–40.
- Swesti, Woro. 2019. "Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Di Banda Aceh." *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia* 13(2):49–65.
- Wang, Yanrui. 2024. "Analysis of the Impact of the Olympic Games on the Economic Growth of Host Countries Based on the ARIMA Model." *Highlights in Business, Economics and Management* 33:487–93.

